

**PENGARUH KAPASITAS SDM, KOMITMEN ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Sally Paulina Sandanafu<sup>1)</sup>, Mis Fertyno Situmeang<sup>2)</sup>**

<sup>1,2)</sup>Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

<sup>1)</sup>[ssandanafu@gmail.com](mailto:ssandanafu@gmail.com), <sup>2)</sup>[missitumeang@gmail.com](mailto:missitumeang@gmail.com)

**ABSTRACT**

This study aims to determine the effect of human resource capacity, organizational commitment, utilization of information technology and internal control accounting to the value of financial reporting information local government in the scope of SKPD Maluku province. This research is causal asosiatif research with quantitative approach, the sampling technique used is purposive sampling. The analysis used is multiple regression analysis (Multiple regression). The result of hypothesis test shows that variable of human resource capacity, organizational commitment and internal control of accountancy have a positive and significant influence to the value of local financial reporting information while the utilization of information technology has no positive effect to the financial information value of the area it is shown with coefficient value of 0.128 with significance level of 0.060.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam lingkup SKPD Provinsi Maluku. Penelitian ini merupakan penelitian kausal asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda (Multiple regression). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pengendalian internal akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan lokal sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi keuangan daerah itu ditunjukkan dengan nilai koefisien 0,128 dengan tingkat signifikansi 0,060.

***Kata kunci:** Kemampuan sumber daya manusia; komitmen organisasi; pemanfaatan teknologi informasi; pengendalian internal akuntansi; nilai informasi pelaporan keuangan*

**1. PENDAHULUAN**

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai

adalah informasi yang mempunyai nilai (Swardjono, 2005). Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Kebermanfaatan informasi merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, Kriteria ini secara umum disebut dengan karakteristik kualitatif atau kualitas informasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengungkapkan hanya 33 persen pengelolaan keuangan daerah yang diungkapkan secara jujur, transparan dan akuntabel. Menurut Tjahjo angka ini merujuk laporan hasil audit Badan pemeriksa Keuangan (BPK) 2013. Selain itu, review hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku pada

Tahun 2011 dan 2012 mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), tahun 2013 dan 2014 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian selanjutnya pada tahun 2015 Pemerintah daerah Provinsi Maluku berhasil menyandang predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Sumber : [www.bpk.go.id/ihps](http://www.bpk.go.id/ihps)). Hasil temuan BPKP juga menunjukkan bahwa informasi yang disajikan masih memiliki kelemahan dalam penyajian pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku.

Penelitian-penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, antara lain dalam penelitian Indriasari (2008) memberikan temuan empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia signifikan mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern akuntansi signifikan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak signifikan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Winidyaningrum (2010), menunjukkan bahwa sumberdaya manusia signifikan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sumber daya manusia pada bagian akuntansi/ tata usaha keuangan sudah mencukupi baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten dan masih terbatasnya penelitian dibidang pemerintahan memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai pelaporan keuangan pada instansi pemerintahan. Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian Indriasari (2008).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Keagenan

Menurut ahmad Elqorni (2009) Teori keagenan (Agency Theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu investor dengan pihak yang memberi wewenang (agency) yaitu manajer, dalam bentuk kontarak kerja sama yang disebut *Nexus of contract*. Implikasi penerapan teori ini dapat menimbulkan perilaku efisiensi atau perilaku oportunistik bagi si agen.

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan

keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya dimata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunist dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009).

Dalam kaitannya dengan nilai informasi keuangan teori keagenan menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara para manajemen dan para stakeholder membuat pentingnya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kecenderungan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginginkan keuntungan pribadi akan membuat dana yang diperoleh dari pemerintah mudah disalahgunakan. Oleh karena itu perlu untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan yang bertindak sebagai principal.

### 2.2. Pelaporan Keuangan Daerah

Suwardjono (2012) menyatakan bahwa pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomi dan sosial negara. Dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Bagian KKAP paragraph 24 disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

## 2.3. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menurut Darwanis & Mahyani (2009), manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Karena manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi, serta manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi.

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

## 2.4. Komitmen Organisasi

Sultani (2009) komitmen organisasi adalah keadaan dimana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, antara lain:

- Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
- Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
- Loyalitas (*loyalty*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pegawai atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pegawai membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pegawai terhadap organisasi. Jika pegawai merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggungjawab dan kesadaran dalam melaksanakan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangan dan kinerjanya dapat meningkat.

## 2.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Winidyaningrum, 2009). Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan

informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan

## 2.6. Pengendalian Intern Akuntansi (PIA)

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan (Mulyadi, 2008). Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*).

## 2.7. Nilai Informasi

Supaya tercapainya tujuan dan manfaat penyajian laporan keuangan, maka informasi yang disampaikan harus bermanfaat pula bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Beberapa karakteristik kualitatif yang harus ada dalam laporan keuangan juga menunjang nilai informasi keuangan. Karakteristik-karakteristik tersebut menggambarkan bagaimana peran informasi diantaranya keterandalan, relevan, dapat dipahami dan diandalkan. Menurut Arif, *et al* (2009) mengatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal atau dapat diandalkan (*reliable*) apabila pengguna laporan keuangan dapat mengandalkan informasi yang menggambarkan kondisi ekonomi atau kejadian-kejadian. Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

## 2.8. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sumber daya manusia merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Indriasari *et al* 2008). Hullah *et al* (2012) menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha

pencapaian tujuan organisasional. Keterandalan pelaporan keuangan daerah dapat tercapai apabila sumber daya manusianya berkualitas dan kualitas tersebut diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*) (Susilo, 2002 dalam Aritonang *et al* 2009), terutama untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan daerah pernah dilakukan Winidyaningrum *et al* (2010), Adriani (2010) dan Hullah *et al* (2012). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

H1: Kapasitas Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

## **2.9. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Penelitian tentang pentingnya komitmen organisasi yang tinggi dalam membuat laporan keuangan yang andal telah dilakukan oleh Rosalin dan Kawedar (2011) yang membuktikan adanya pengaruh positif komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan di Badan Layanan Umum. Dengan demikian semakin tinggi komitmen organisasi dalam mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan maka akan semakin andal (*reliable*) informasi laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

H2: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

## **2.10. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Menurut Hamzah (2009) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya, (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negeri ini (dalam Winidyaningrum *et al* 2010). Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan, karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang andal.

Penelitian Indriasari *et al* (2008), Winidyaningrum *et al* (2010), Mustafa *et al* (2010), Rosalin *et al* (2011) dan Hullah *et al* (2012) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

## **2.11. Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Sistem pengendalian internal menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja), sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keterandalan karena Laporan Keuangan yang dihasilkan benar dan valid. Darwanis dan desi dwi mahyani (2009) menyimpulkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

H4: Pengendalian intern Akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

## **3. METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal menurut sugiyono (2008) adalah penelitian yang di maksudkan untuk mengungkapkan permasalahan yang bersifat hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (yang mempengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi). Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber pada data dalam penelitian ini adalah bagian yang mengelola dokumen anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi Maluku. Data dikumpulkan melalui survey menggunakan kuesioner dimana item pernyataan dengan menggunakan skala likert. Dengan demikian data dikumpulkan dan dianalisis secara kuantitatif.

### **3.1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah daerah Provinsi Maluku yang berjumlah 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah ((SKPD), yang menurut Perda Nomor. 22 tahun 2014 terdiri dari 1 Sekretariat Dewan dan 7 Biro; Perda Nomor. 23 Tahun 2014 terdiri dari 15 Dinas; Perda Nomor 24 Tahun 2014 terdiri dari 10 Badan, 1 Inspektorat, 1 Satpol PP, 3 Rumah Sakit; Perda Nomor 25 Tahun 2014 terdiri dari 2 Sekretariat dan 3 Badan.

### **3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

#### **3.2.1. Variabel Independen**

##### **a) Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)**

Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk

melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. (Laporan akhir Studi GTZ & USAID/CLEAN Urban , 2001. Dalam Indriasari *at al* 2008). Variabel kapasitas sumber daya manusia diukur dengan 10 item pernyataan yang mengacu pada Indriasari & Nahartyo (2008). Jawaban item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran 10-50. Indikator yang digunakan dalam pengukuran variable ini adalah pendidikan dan pengalaman kerja.

## b) **Komitmen Organisasi (X2)**

Komitmen organisasi adalah keadaan dimana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu (Sultani, 2009). Indikator untuk mengukur komitmen organisasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Mengetahui tentang visi dan misi organisasi
2. Memiliki loyalitas terhadap organisasi
3. Keterlibatan dalam pekerjaan
4. Adanya usaha yang maksimal dalam pekerjaan
5. Mengetahui tentang tujuan dan sasaran pekerjaan
6. Pengetahuan tentang pekerjaan utama.

Variabel komitmen organisasi diukur dengan 6 item pernyataan yang mengacu pada Allen dan Meyer (1990). Jawaban item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran 6-30.

## c) **Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)**

Indikator untuk mengukur pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Memiliki perangkat komputer
2. Memiliki dan memanfaatkan jaringan internet
3. Mengadakan proses akuntansi yang terkomputerisasi
4. Menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Adanya laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
6. Adanya pemeliharaan peralatan
7. Adanya perbaikan peralatan yang rusak/usang

Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan 8 item pernyataan yang mengacu pada Indriasari & Nahartyo (2008). Jawaban item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran 8-40.

## d) **Pengendalian Intern Akuntansi (X4)**

Pengendalian intern akuntansi adalah bagian dari sistem pengendalian intern, yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi (Mulyadi, 2008).

Indikator untuk mengukur pengendalian intern akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Menyelenggarakan sistem dan prosedur akuntansi yang memadai meliputi: Prosedur

akuntansi penerimaan kas, Prosedur akuntansi pengeluaran kas, Prosedur akuntansi aset, Prosedur akuntansi selain kas.

2. Memiliki daftar rekening (*chart of account*)
3. Transaksi didukung oleh: otorisasi pihak yang berwenang, bukti yang valid dan sah, dicatat dalam buku catatan akuntansi
4. Memiliki catatan akuntansi yang *up to date*
5. Adanya review/ pemeriksaan laporan keuangan
6. Sistem akuntansi yang ada dapat dilakukan *audit/transaction trail*.
7. Ada pemisahan tugas

Variabel pengendalian intern akuntansi diukur dengan 9 item pernyataan yang mengacu pada Indriasari & Nahartyo (2008). Jawaban item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran 9-45.

## 3.2.2. Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah Nilai informasi pelaporan keuangan daerah yang dalam penelitian ini di proksikan dengan keterandalan. Menurut PP 71 Tahun 2010 keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Indikator untuk mengukur keterandalan pelaporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Adanya transaksi keuangan yang jujur dan wajar
2. Adanya laporan keuangan pokok sesuai aturan yaitu: Neraca, Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji
5. Adanya rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik
6. Informasi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan umum

Variabel nilai informasi pelaporan keuangan daerah yang di proksikan dengan keterandalan diukur dengan 7 item pernyataan yang mengacu pada Indriasari & Nahartyo (2008). Jawaban item pernyataan tersebut memiliki nilai kisaran 7-35.

## 3.3. Teknik Analisis Data

### 3.3.1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum. Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

### 3.3.2. Uji Kualitas Data

Untuk meyakinkan bahwa pengukuran yang digunakan adalah pengukuran yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengujian

terhadap kualitas data. Uji kualitas data dihasilkan dari penggunaan instrumen dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas data. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.

**3.3.3. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolonieritas, dan gejala autokorelasi. Pengujian dilakukan meliputi:

- a. Uji normalitas dengan menggunakan one sample *Kormogorov Smirnov*, grafik histogram dan grafik p-plot
- b. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot.
- c. Uji multikolonieritas dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan

**3.3.4. Analisis Regresi Linier Berganda**

Pengujian Regresi dijabarkan dalam dua bentuk sebagai berikut:

$$NIPKD = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 KO + \beta_3 PTI + \beta_4 PIA + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- NIPKD =Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah
- A =Konstanta
- $\beta_1$  =Koefisien regresi Kapasitas Sumber Daya Manusia
- $\beta_2$  =Koefisien regresi Komitmen Organisasi
- $\beta_3$  =Koefisien regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- $\beta_4$  =Koefisien regresi Pengendalian Intern Akuntansi
- KSDM =Kapasitas Sumber Daya Manusia`
- KO =Komitmen Organisasi
- PTI =Pemanfaatan Teknologi Infomasi
- PIA =Pengendalian Intern Akuntansi
- e =Error

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Proses Pengumpulan Data**

Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan 129 kuesioner kepada responden yang dipilih berdasarkan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang dipakai sebagai pertimbangan yaitu; Para pegawai yang melakukan fungsi akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Kepala sub bagian keuangan, bendahara dan staf akuntansi (petugas SIMDA) dan Responden dalam penelitian ini memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada bagian penatausahaan keuangan. kuesioner disebarkan dengan beberapa cara mengantarkannya langsung ke responden dan diambil kembali sesuai dengan kesepakatan. Ringkasan mengenai pengiriman dan penerimaan kuisioner, dinyatakan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Rincian Pengiriman Dan Pengembalian Kuesioner Penelitian**

Kuisioner yang diedarkan	129
Kuesioner yang kembali setelah diisi lengkap	114
Kuesioner yang tidak dikembalikan	15
Tingkat pengembalian ( <i>response rate</i> ) 114/129 * 100%	88,37%

Sumber: data primer diolah, 2018

Tabel 1 di atas menginformasikan bahwa, total kuesioner yang disebarkan sebanyak 129 kuesioner yang kembali hanya sebanyak 114 kuesioner atau sebesar 88,37%. Sisa sebanyak 15 kuesioner tidak dikembalikan oleh responden. Dalam kuesioner dimaksud, data responden seperti jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, jabatan dan masa kerja yang merupakan profil 114 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2. Profil Demografi Responden**

Profil Responden	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin :		
• Laki-laki	35	30,7
• Perempuan	79	69,3
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>100</b>
Umur :		
• 20 – 30 th	14	12,3
• 31 – 40 th	40	35,1
• 41 – 50 th	33	28,9
• >50 th	27	23,7
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>100</b>
Pendidikan Terakhir :		
• SMA Sederajat	16	14
• DIII	5	4,4
• S1	81	71,1
• S2	12	10,5
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>100</b>
Jabatan :		
• Kasubag	33	28,9
• Bendahara	41	36
• Petugas Simda	40	35,1
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>100</b>
Masa Kerja :		
• 1 – 5 th	13	11,4
• 6 – 10 th	36	31,6
• 11 – 20 th	31	27,2
• >20 th	34	29,8
<b>Total</b>	<b>114</b>	<b>100</b>

Sumber: Data primer diolah,2018

**4.2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Variabel**

Gambaran mengenai nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi variabel-variabel penelitian yaitu kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang berupa total jawaban masing-masing responden, disajikan dalam tabel statistik deskriptif sebagai berikut;

Tabel 3. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kualitas Sumber Daya Manusia	114	15	50	39.96	6.626
Komitmen Organisasi	114	15	30	22.96	3.913
Pemanfaatan Teknologi Informasi	114	20	39	30.76	4.803
Pengendalian Intern Akuntansi	114	22	44	34.79	5.595
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan	114	18	35	28.00	4.066
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Data primer diolah, 2018

4.3. Pengujian Asumsi Klasik

4.3.1. Hasil Pengujian Normalitas

Untuk Menguji normalitas data, dilakukan secara statistik yaitu dengan uji *kolmogorov-smirnov* (KS Model) dan pengujian secara grafik melalui grafik p-plot dan grafik histogram. Adapun hasil output SPSS untuk pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel dan berikut ini:

Tabel 4. Hasil Pengujian Normalitas Ks Model

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.211	3.812		.580	.563
Kualitas Sumber Daya Manusia	.245	.048	.399	5.067	.000
Komitmen Organisasi	.241	.085	.232	2.824	.006
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.128	.067	.151	1.897	.060
Pengendalian Intern Akuntansi	.188	.060	.259	3.149	.002

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Sumber : data primer yang diolah, 2018

4.3.2. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.

Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinieritas

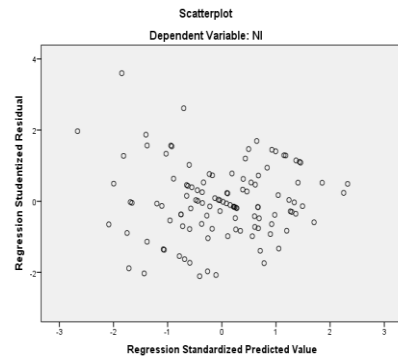
Model	Collinearity Statistics		Keputusan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Kualitas Sumber Daya Manusia	.998	1.002	Bebas multikolinieritas
Komitmen Organisasi	.919	1.088	Bebas multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.974	1.027	Bebas multikolinieritas
Pengendalian Intern Akuntansi	.913	1.096	Bebas multikolinieritas

Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Sumber: Data primer diolah, 2018

4.3.3. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas dan sebaliknya jika tetap disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau bebas dari heteroskedastisitas.



Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018

Gambar 1. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Berdasar pada grafik *scatterplot* di atas, tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik data menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji-T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.211	3.812		.580	.563
Kualitas Sumber Daya Manusia	.245	.048	.399	5.067	.000
Komitmen Organisasi	.241	.085	.232	2.824	.006
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.128	.067	.151	1.897	.060
Pengendalian Intern Akuntansi	.188	.060	.259	3.149	.002

a. Dependent Variable: Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa variabel kualitas sumber daya manusia berhubungan positif 0,245 atau 24,5% terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dengan tingkat probabilitas sebesar 0.000 sehingga hipotesis 1 diterima. Hasil pengujian hipotesis pada tabel di atas menunjukkan bahwa



variabel kualitas sumber daya manusia berhubungan positif 0,245 dengan nilai probabilitas 0,000 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa, variabel komitmen organisasi berhubungan positif 0,241 dengan nilai probabilitas 0.006 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan komitmen organisasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan beberapa uraian hipotesis yang diatas, maka hasil rangkumannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.	Terbukti
H2	Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.	Terbukti
H3	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.	Tidak Terbukti
H4	Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.	Terbukti

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018

Hasil uji hipotesa ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Susilo dan Aritonang, 2009 yang menunjukkan sumber daya manusia berkualitas dan kualitas tersebut diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*), terutama untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, kualitas SDM pegawai kotamadya Ambon bagian SKPD propinsi Maluku terbukti dapat menentukan keandalan informasi pelaporan keuangan karena dalam melaksanakan kegiatan pelaporan dibutuhkan SDM yang cukup handal dan kompeten di bidangnya.

Hasil uji hipotesis 2 menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan positif 0,241 atau sebesar 24,1% dengan nilai probabilitas 0.006 sehingga hipotesis 2 diterima.

Hasil uji hipotesis ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rosalin dan Kawedar (2011) yang membuktikan adanya pengaruh positif komitmen organisasi terhadap keandalan pelaporan keuangan di Badan Layanan Umum. Sejalan dengan penelitian ini, menunjukan bahwa komitmen organisasi dalam suatu lingkungan SKPD propinsi Maluku sangat mempengaruhi nilai informasi suatu pelaporan keuangan.

Hasil uji T menunjukan bahwa Pemanfaatan

teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi > 0,05 yakni 0,60 sehingga hipotesis pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan ditolak. Hasil hipotesis ini tidak mendukung penelitian Indriasari *et al* (2008), Winidyaningrum *et al* (2010), Mustafa *et al* (2010), Rosalinet *al* (2011) dan Hullah *et al* (2012) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh pegawai PEMDA Maluku tidak mempengaruhi keandalan informasi pelaporan keuangan di kalangan SKPD propinsi Maluku sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak bisa diterima.

Berdasarkan hasil uji hipotesa III dalam penelitian ini ditunjukan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 0,188 atau signifikan sebesar 18,8% dan tingkat probabilitas sebesar 0,02 sehingga hipotesis hubungan antara pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan diterima.

Hasil uji hipotesis ini mendukung penelitian Darwanis dan desi dwi mahyani (2009) menyimpulkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Merujuk pada penelitian ini maka dapat dinyatakan bahwa system pengendalian akuntansi yang digunakan dan dijalankan SKPD propinsi Maluku turut mengang peran penting dalam menentukan nilai informasi pelaporan akuntansi.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan penelitian ini antara lain:

1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien *B* sebesar 0,245 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.
2. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien *B* sebesar 0,241 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006.
3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien *B* sebesar 0,128 dengan nilai signifikansi sebesar 0,060.
4. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Maluku. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien *B* sebesar 0,188 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002.



**5.2. Saran**

Sesuai dengan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka berikut ini diuraikan saran penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam pengembangan penelitian selanjutnya antara lain :

1. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian di SKPD dalam meningkatkan kualitas nilai informasi pelaporan keuangan adalah dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang ada. Peningkatan ini dilakukan dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerja masing-masing aparatur. Disamping itu, sarana teknologi informasi lebih diperbanyak serta menyebar pada semua SKPD, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Aparatur lebih dimotivasi untuk tetap komit dengan tujuan organisasi serta pengendalian intern akuntansi atas setiap pekerjaan lebih ditingkatkan lagi.
2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan nilai *Adjusted R Square* yang relatif rendah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat menambah bahkan menggunakan variabel-variabel lainnya untuk mendapatkan temuan-temuan baru yang lebih bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satuan kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Penelitian selanjutnya dapat melakukan generalisasi pada SKPD yang ada pada beberapa pemerintah kota maupun kabupaten di Provinsi Maluku.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arif, Bahtiar, Muchlis, dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta; Akademia.

Aritonang, Aldiani sultani dan Firman Syarif. 2009. *Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005. Pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu*. Jurnal Akuntansi vol.12

Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. *Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), *Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengendalian intern Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Tahun Anggaran 2015*. Nomor : 2.B/HP/XIX.AMB/05/2016. Tanggal 30 Mei 2016.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), *Laporan Hasil Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Tahun Anggaran 2015*. nomor . 2.C/HP/XIX.AMB/05/2016 tanggal 30 Mei 2016

Darwanis dan desi dwi mahyani (2009). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPA Provinsi Aceh)*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Vol. 2 No. 2. Hal. 133-151.

Elqorni, 2009. *Mengenal Teori Keagenan*. <http://elqorni.dpress.com>. Diakses 26 juni 2018

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta.

Hullah, A.R., Pangemanan, S., Tangkuman, S. & Budiarmo, N. 2012. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Sulawesi Utara*.

Indriasari, D. & Nahartyo, E. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Simposium Nasional Akuntansi XI di Pontianak, 23-24 Juli.

Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi 10. Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No.1, Hal. 1-17.

Mustafa, S. Sutrisno & Rosidi. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari*. Jurnal Akuntansi. Diunduh dari <http://elibrary.ub.ac.id/bitstream/123456789/32830/2.pdf>. (Akses Agustus, 2017)

Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3. Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58

- Tahun 2005. Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*. [www.bpk.go.id/ihps](http://www.bpk.go.id/ihps)
- Rosalin,F. & Kawedar, W. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)*. Under graduate Thesis, Universitas Diponegoro.
- Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban. Januari 2001. *Pengembangan Kapasitas Bagi Pemerintah Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor. Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan DPRD*. [www.gtzfdm.or.id](http://www.gtzfdm.or.id). (Akses 13 Maret 2018)
- Winidyaningrum, Celviana. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*. Semarang. Simposiun Nasional Akuntansi XIII, Universitas Diponegoro.